

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi interpretasi penulis terhadap judul skripsi “Penerimaan Asas Tunggal Pancasila oleh Nahdlatul Ulama : Latar Belakang dan Proses 1983-1985” yang menjadi bahan penelitiannya disertai dengan analisis penulis dalam membuat sebuah kesimpulan atas jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran atau rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Terdapat enam hal yang dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan telah dibahas, yaitu:

*Pertama*, mulai tahun 1982 pemerintah membicarakan pentingnya penerapan Pancasila sebagai asas semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Kebijakan pemerintah terhadap Pancasila sebagai asas tunggal didorong oleh dua latar belakang yaitu ideologis dan politis. Latar belakang ideologis yakni *faktor pertama* setelah pemberontakan PKI tahun 1965 dapat dipadamkan, pemerintah terus mewaspadaikan kebangkitan kembali partai tersebut meskipun telah resmi dilarang. *Faktor kedua* adalah munculnya gerakan fundamentalis muslim di berbagai wilayah di dunia Islam pada tahun 1970-an, khususnya di Iran. Khawatir. *Faktor ketiga* yang mendorong pemerintah terus

melindungi Pancasila agaknya karena munculnya gerakan separatis dan fundamentalis di negara ini. Sedangkan latar belakang politis yaitu *Faktor pertama* adalah pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya di mana terjadi pertarungan fisik (yang sering berakibatkan fatal), khususnya antara pendukung Golkar dan PPP. *Faktor kedua* adalah kerana secara ideologis Pancasila akan menempati posisi yang lebih kuat dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa Indonesia.

*Kedua*, gagasan pemerintah tentang penyatuan asas bagi seluruh partai politik, untuk pertama kali diajukan Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus 1982. Gagasan Presiden ini dimasukkan dalam ketetapan MPR No. II/1983 (pasal 3 bab IV). Pada tanggal 19 Februari 1985, pemerintah, dengan persetujuan DPR, mengeluarkan undang-undang No.3/1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Pada tanggal 17 juni 1985, pemerintah lagi-lagi atas persetujuan DPR, mengeluarkan undang-undang No. 8/1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Reaksi terhadap kebijakan pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan semua organisasi kemasyarakatan datang dari berbagai individu muslim. Setelah berhasil menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik, agenda politik Orde Baru selanjutnya adalah menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh ormas. Ormas sosial keagamaan adalah yang paling berkepentingan untuk membicarakan penyeragaman asas bagi masing-masing organisasi

keagamaan. MAWI (Majelis Agung Wali Geraja Indonesia) dan DGI (Dewan Geraja Indonesia), misalnya, menolak undang-undang tersebut. Kelompok agama Budha dan Hindu dengan mudah menerima asas tunggal Pancasila karena kebetulan tidak memiliki *power* untuk berbicara lebih lantang tentang keinginan pemerintah tersebut. Sejumlah ormas Islam keberatan terhadap gagasan pemerintah tersebut.

*Ketiga*, Wafatnya K.H Bisri Syansuri segera menimbulkan disintegrasi dikalangan pucuk pimpinan NU, yang kemudian dikenal dengan konflik antara kubu Cipete dan kubu Situbondo. Kelompok Situbondo terdiri dari tokoh non-politisi (Kubu Ulama) ditokohi oleh K.H Ali Ma'sum serta K.H As'ad Syamsul Arifin dan kelompok Cipete adalah bersifat politik (kubu politisi) yang diwakili K.H. Idham Chalid. Waktu itu kalangan anak muda dan beberapa tokoh tua yang konsisten terhadap kebesaran NU (tidak ingin hidup dibawah bayang kekuasaan represif) mulai berpikir ulang tentang visi dan misi NU kedepan. Pikiran ini kemudian mengkristal menjadi bentuk polarisasi tajam antara yang ingin NU tetap di politik bersama PPP (terwakili oleh pihak politisi) dan NU kembali menjadi organisasi keagamaan semata (diwakili oleh nonpolitisi). Perbedaan pandangan ini, disaat perseteruan kubu Cipete vs Situbondo (kubu politisi vs kubu ulama) kian memuncak, isu penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas Parpol dan Golkar menggelinding bak bola salju. Pemerintah jelas lebih menyukai kelompok Situbondo daripada kelompok Cipete karena kedekatan para pemimpin kubu ini dengan pemerintah. Pada saat itu sedang dalam persaingan terbuka, dan keduanya bermaksud menyelenggarakan Munas dan kemudian Muktamar. Kelompok Cipete

dapat dipastikan akan menerima, tetapi hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan protes dan perlawanan dari faksi NU yang lain. Kiai As'ad dan sekutu-sekutunya tampaknya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat seluruh organisasi ini menuruti tuntutan pemerintah. Karena itu, pemerintah memberikan dukungannya kepada Musyawarah Nasional Alim Ulama, yang diselenggarakan di pesantren Kiai As'ad di Situbondo pada Desember tahun itu juga.

*Keempat*, Khusus bagi NU sebagai organisasi keagamaan (jamiyah dinniyyah) penerimaan asas Pancasila bukan sekedar persoalan politis-organisatoris, melainkan persoalan keagamaan yang diselesaikan secara keagamaan juga melalui argumen-argumen keagamaan yang diketengahkan dalam Mukhtar Situbondo. Kemudian Mukhtar Situbondo yang mengukuhkan keputusan Munas 1983 memutuskan menerima Pancasila berdasarkan tiga pertimbangan yaitu Pertama, NU menganut pendirian bahwa Islam adalah agama fitriah (sifat asal atau murni); sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan dan dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. Kedua, konsep ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam. Ketiga, dari sudut sejarah bahwa ulama-ulama dengan cara mereka sendiri dan NU sebagai organisasi keagamaan yang berakar kuat di dalam masyarakat, telah turut berjuang merebut kemerdekaan sebagai kewajiban keagamaan.

*Kelima*, Munas Alim Ulama ini bertempat di PP Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo di Situbondo, Jawa Timur (pesantren yang diasuh oleh K.H. As'ad

Syamsul Arifin) yang diselenggarakan tanggal 13-16 Rabi'al-Awwal 1404/18-21 Desember 1983 M. Selain membahas keagamaan (*masa'il diniyah*) yang menjadi agenda rutin, Munas 1983 terasa istimewa karena di Munas ini akan ditentukan masa depan NU *vis a vis* negara. Di antara beberapa keputusan Munas NU, ada salah satu masalah yang paling penting yaitu, pemantapan Pancasila sebagai asas organisasi, penjabarannya dalam Anggaran Dasar serta deklarasi hubungan Pancasila dan Islam. Sukses Munas 1983 di Situbondo meratakan jalan menuju suksesnya Muktamar NU 1984. Muktamar NU di Situbondo adalah muktamar NU yang ke-27 tahun 1984 bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo asuhan K.H. As'ad Syamsul Arifin. Muktamar diselenggarakan mulai 8 Desember hingga 12 Desember 1984. Tujuan Muktamar NU ke-27 yaitu salah satunya adalah menghasilkan atau mensahkan hasil Munas Alim Ulama NU di Situbondo yaitu tentang penerimaan asas tunggal Pancasila.

*Keenam*, sebagai implementasi penerimaan NU atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Anggaran Dasar NU pun sejak 1984 berubah sesuai dengan paradigma tersebut. Ada hal yang menarik untuk dicatat dari perkembangan Anggaran Dasar NU dari muktamar ke muktamar. Dalam Anggaran Dasar NU hasil Muktamar ke-27 di Situbondo, 8-12 Desember 1984, asas NU berubah dari Islam menjadi Pancasila. Dalam rumusan ini dibedakan antara asas dan aqidah. Islam ditempatkan sebagai aqidah, bukan asas. Sedangkan asas diisi dengan Pancasila. Melalui Muktamar Situbondo, NU merupakan ormas Islam terbesar yang pertama menerima asas tunggal. Pemerintah berterima kasih, seketika itu juga sikap pemerintah kemudian

berubah, menganggap NU tidak oposan lagi. Perubahan sikap pemerintah ini tentu saja disambut gembira oleh massa NU yang berada di daerah. Pengusaha NU mulai mendapatkan tender lagi, dan secara ekonomi mendapat kemajuan yang sangat bisa dirasakan. PBNU yang baru itu betul-betul membawa perubahan iklim kebijakan pemerintah yang nuansanya sangat dirasakan oleh aktivis NU di daerah.

## 5.2 Rekomendasi

### 1. SK-KD di Materi Pelajaran Sejarah SMA

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis direkomendasikan untuk Materi pelajaran sejarah semester 1 kelas XII IPS. Hasil penelitian ini dimasukan kedalam materi pokok menguatnya peran negara pada masa Orde Baru dan dampaknya terhadap kehidupan sosial politik masyarakat. Dengan kompetensi dasar menganalisis Perkembangan Pemerintah Orde Baru serta dengan standar kompetensi menganalisis perjuangan sejak Orde Baru sampai dengan Masa Reformasi.

### 2. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dalam lingkup yang luas dan mendalam bagi penelitan selanjutnya. Lebih lanjut lagi peneliti selanjutnya meneruskan penelitian yang penulis kaji yaitu dengan mengkaji tentang penerapan Pancasila yang dilakukan Oleh NU pasca kebijakan asas tunggal serta mengkaji tentang kekonsistenan NU mempertahankan asas Pancasila walaupun rezim Orde Baru sudah berakhir.